

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
EFESIENSI BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Muhammad Andi Saputra

Nim : 222016285

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2021

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
EFESIENSI BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DIPROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akutansi**



**Nama : Muhammad Andi Saputra
Nim : 222016285**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Andi Saputra
Nim : 222016285
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Analisis efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapatan yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan normal yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, februari 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Andi Saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Muhammad Andi Saputra
NIM : 22 2016 285
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akutansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada tanggal, Febuari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021



Welly, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
u.b.Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., M.Si., AK.CA.
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis. Selama ada keyakinan semua akan menjadi mungkin.”

“Bermimpilah sebanyak mungkin dan kejarlah mimpi itu”

(Muhammad Andi Saputra)

Terucap syukur Kepada Allah SWT,

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakanku dan memberikan motivasi bagiku**
- ❖ Adikku yang selalu mensupportku dan menyemangatiku**
- ❖ Keluargaku tercinta**
- ❖ Sahabat rantauan seperjuanganku menuntut ilmu di kota Palembang**
- ❖ Almamater**

PRAKATA

Assalamu'alaikum WarahmatullahibWabarakatu

Alhamdulillahirobil 'alamin segala puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpah segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Efesinsi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akutansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyajian yang tak lain disebabkan oleh keterbatasannya kemampuan yang petulis miliki.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Allah SWT, ke dua orang tua ku tersayang, bapakku (Muhammad Lutpi), mamaku (Sumiyati), saudaraku yang telah memberi dorongan semangat, dan doa yang selalu diberikan serta panjakan kepada penulis. Penulis ini juga mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak Drs. Sunardi S.E., M.SI dan ibu Welly, S.E., M.SI Yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas memberikan motivasi kepada penulis tentang arti suatu proses pencapaian akhir di skripsi ini. Oleh sebab itu, penulisi dalam penyelesaian studi ini dan tidak lupa juga penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor beserta staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajudin, S.E.,Ak.,M.CA dan ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si selaku Ketua Program dan Sketaris program studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs Sunardi, S.E.,M.Si selaku Dosen pembimbing satu saya yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing dua saya yang telah mengajarkan, membantu serta memberikan banyak arahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai sekarang.
7. Bapak Friski Danu Rahmat , S.E., M.Si yang memberikan semangat,arahan dan saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Eman Satria S.E,MM, Ak, CA yang telah membantu penulis dalam pengambilan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya wahyu,astra,arya,fikri,deri,patra,ganding,maharani,heru,yafi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman seperjuangan saya angkatan 2016

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semogah Allah SWT membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih bnyak kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis. Semoga segala bantuan yang di berikan mendapatkan limpahan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal.

Palembang februari 2021

(Muhammad Andi Saputra)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori.....	16
1. Pendapatan Asli Daerah	16
2. Belanja Daerah	21
3. Efektivitas	25
4. Efisiensi.....	27
B. Penelitian Sebelumnya.....	30

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Operasionalisasi Variabel.....	34
D. Data yang di perlukan	35
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	36
1. Analisis Data	36
2. Teknik Analisis Data	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan	38
2. Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin	40
3. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir	41
4. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim	42
5. Gambaran Umum Kabupaten Lahat	43

6. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas	44
7. Gambaran Umum Kabupaten PALI	45
8. Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin	46
9. Gambaran Umum Kabupaten OKU Timur	47
10. Gambaran Umum Kabupaten OKU Selatan	49
11. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir	50
12. Gambaran Umum Kabupaten Empat Lawang	51
13. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu	52
14. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas Utara	53
15. Gambaran Umum Kota Palembang	54
16. Gambaran Umum Kota Prabumulih	55
17. Gambaran Umum Kota Pagar Alam	57
18. Gambaran Umum Kota Lubuk Linggau	58
19. Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja Provinsi Sumsel	59
20. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	60
B. Pembahasan Penelitian.....	67
1. Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Selatan	68
2. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan	126

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 153

B. Saran 154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Anggaran dan Realisasi PAD	7
Tabel I.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	12
Tabel II.1 Kriteria Efektifitas	27
Tabel II.2 Kriteria Efisiensi	29
Tabel II.3 Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian Sebelumnya	32
Tabel III.1 Operasionalisasi Variable	34
Tabel IV.1 Luas wilayah dan Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan	39
Tabel IV.2 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ..	68
Tabel IV.3 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKI	73
Tabel IV.4 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim	76
Tabel IV.5 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat	80
Tabel IV.6 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas	84
Tabel IV.7 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU	86
Tabel IV.8 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin	90
Tabel IV.9 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Timur	94
Tabel IV.10 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan ..	97
Tabel IV.11 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir	100
Tabel IV.12 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Empat Lawang	102

Tabel IV.13 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten PALI	106
Tabel IV.14 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	109
Tabel IV.15 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	110
Tabel IV.16 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih.....	114
Tabel IV.17 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Pagar Alam	117
Tabel IV.18 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau	120
Tabel IV.19 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan	124
Tabel IV.20 Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	126
Tabel IV.21 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten OKI	128
Tabel IV.22 Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim	129
Tabel IV.23 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten Lahat	130
Tabel IV.24 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas	132
Tabel IV.25 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten OKU.....	133
Tabel IV.26 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten Banyuasin	135
Tabel IV.27 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten OKU Timur.....	136
Tabel IV.28 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten OKU Selatan	138
Tabel IV.29 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten Ogan Ilir	139
Tabel IV.30 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten Empat Lawang....	140
Tabel IV.31 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten PALI	142

Tabel IV.32 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas	
Utara.....	143
Tabel IV.33 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kota Palembang	144
Tabel IV.34 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Asli Kota Prabumulih.....	146
Tabel IV.35 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kota Pagar Alam.....	147
Tabel IV.36 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Kota Lubuk Linggau	148
Tabel IV.37 Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi	
Sumatera Selatan.....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	38
Gambar IV.2 Grafik Perkembangan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	125
Gambar IV.3 Grafik Perkembangan Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	152

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Biodata Penulis
- Lampiran 2 : Fotocopy Surat Keterangan Riset
- Lampiran 3 : Fotocopy sertifikat membaca dan menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 4 : Fotocopy Sertifikat SPSS
- Lampiran 5 : Fotocopy sertifikat Mata Kuliah Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 6 : Fotocopy sertifikat Mata Kuliah Komputer Akutansi
- Lampiran 7 : Fotocopy sertifikat (PK2MB)
- Lampiran 8 : Bebas Plagiat
- Lampiran 9 : Kartu Bimbingan

ABSTRAK

Muhammad Andi Saputra / 222016285 / 2021 / Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Efektifitas Pendapatan Asli daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018 yang tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan tidak efektif dan tingkat efisiensi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018 sudah dapat dikategorikan efisien.


Kata Kunci: Belanja Daerah, Efektifitas Efisiensi Ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Muhammad Andi Saputra / 222016285 / 2021 / Effectiveness Analysis of Local Government Revenue and Efficiency of Region Expense of South Sumatera Province.

The purpose of this study research was to find out the Effectiveness level of Local Government Revenue and Efficiency of Region Expense in Regency and City of South Sumatera Province. The data used was secondary. The technique of collecting data used was document analysis. The data analysis method used in this research was quantitative analysis. The analysis technique used in this research was the qualitative analysis technique. The results showed that there were several various levels of effectiveness in Regency and City of South Sumatera Province in 2016-2018. The findings showed that it was equally ineffective and the level of efficiency Expenditure Budget in Regency and City of South Sumatera Province in 2016-2018 could be categorized as equally efficient.

Key words: Expenditure Budget, Economic Effectiveness Efficiency, and Regional Original Revenue (PAD)

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A81	Muhammad Andi Saputra	222016285	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Beni Pekei(2016:151), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tersebut.

Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, disamping kedua hal tersebut sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya pendapatan asli daerah juga perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan PAD (Mentayanidkk, 2014: 31).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan demi mengurangi ketergantungan fiscal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mendorong Penerimaan Pemerintah Daerah dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diterbitkannya Undang-Undang tersebut merupakan upaya agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dipungut dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (pp No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan).

Mardiasmo (2018:5) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kepmendagri No.690.900.327 efektifitas memiliki

beberapa kriteria keuangan, yaitu 100% sama dengan sangat efektif, 90%-80% sama dengan efektif, 80%-90% cukup efektif, 60%-80% sama dengan kurang efektif, dan di bawah 50% sama dengan tidak efektif.

Mardiasmo (2018:5) Efisiensi diukur dengan rasio-rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisien dibandingkan dengan unit B, unit A lebih efisiensi tahun ini dibandingkan tahun lalu, dan seterusnya, Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Menurut Kemendagri No. 690.900.327. Efisiensi memiliki beberapa kriteria nilai efisiensi, yaitu 100% ke atas sama dengan tidak efisien, 90%-100% sama dengan kurang efisien, 80%-90% cukup efisien, 60%-80% sama dengan efisien, dan di bawah 50% sama dengan sangat efisiensi.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

Berlakunya undang-undang No.33 th 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan

mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD. Namun kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD. Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dana transfer tersebut berimplikasi pada APBD, yaitu pada Pos penerimaan, sebagai konsekuensinya adalah bertambah besarnya jumlah penerimaan daerah. Perubahan jumlah penerimaan daerah yang cukup besar tersebut harus diikuti

dengan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dan disertai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dapat memberikan spirit bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan sumber ekonomi yang ada secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif. Misi utama UU tersebut bukan hanya pelimpahan kewenangan, pembiayaan, tetapi dimaksudkan agar penataan sistem pengelolaan keuangan lebih baik, sehingga diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah yang sehat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance*. Oleh karenanya dibutuhkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat memberikan informasi sumber daya keuangan daerah, dan mengukur sejauh mana prestasi pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat (publik).

Penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana

utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik *et al* dalam Maimunah M, 2006).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Fathiyah (2012) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hasil Analisis Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan adanya penghematan anggaran di tahun 2011 karena rasio efisiensinya kurang dari 100% dengan penyerapan anggaran tahun 2011 adalah sebesar 90,27% dan hasil analisis Rasio Belanja terhadap PDRB tahun 2011 menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah terhadap PDRB masih relatif kecil yaitu sebesar 9,24%.

Ika Dkk (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan PAD yang Potential Sebagai Dasar untuk Meningkatkan Derajat Ekonomi Daerah Kabupaten Situbondo yang menyatakan bahwa Efektifitas penerimaan sumber PAD antara target dan realisasi setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan, Tahun 2011 dengan tingkat efektifitas sebesar 101,33 %, Tahun 2012 dengan tingkat efektifitas mencapai 102,29 %, Tahun 2013 dengan tingkat efektifitas sebesar 100,94 % Tahun 2014 dengan tingkat efektifitas sebesar 101,15 % dan Tahun 2015 sebesar 99,05 % . Rata-rata

efektifitas Penerimaan Sumber PAD pada tahun 2011 s.d 2015 dari Pajak daerah mencapai

116,54% (sangat efektif). Retribusi Daerah hanya mencapai 85,35% (cukup efektif), Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 97,41% (efektif) dan untuk sumber PAD lain-lain yang sah berada ditingkat 118,77 (sangat efektif).

Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat di tampilkan dalam table di bawah ini I.1

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah
2016-2018

No	Keterangan		Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	Kab musi banyuasin	Pendapatan pajak Daerah	2016	66.037.462.273	59.484.298.430	90
			2017	69.978.188.000	58.677.094.555	83
			2018	72.700.935.000	81.342.647.355	111
		Pendapatan retribusi daerah	2016	9.313.655.250	7.601.509.703	81
			2017	9.468.523.600	6.414.029.554	67
			2018	9.677.643.000	5.581.288.249	57
		Pendapatan kekayaan daerah yang di sah kan	2016	12.593.331.104	12.593.331.104	100
			2017	13.000.000.000	12.366.700.277	95
			2018	13.000.000.000	12.232.599.240	94
		Lain lain pad yang sah	2016	106.846.800.688	89.333.277.288	83
			2017	134.227.086.181	131.952.211.366	98
			2018	117.355.066.000	111.081.502.438	94
2	Kab OKI	Pendapatan pajak daerah	2016	20.068.327.509	21.849.570.409	108
			2017	38.888.500.000	37.271.211.375	95
			2018	51.503.500.000	45.688.054.975	88
		Pendapatan retribusi daerah	2016	9.148.649.182	6.333.292.298	69
			2017	5.366.858.182	4.889.667.537	91
			2018	5.478.100.000	4.409.777.193	80
		Pendapatan kekayaan daerah yang di sah kan	2016	7.337.338.434	7.337.338.433	100
			2017	7.000.000.000	7.100.861.280	101
			2018	7.000.000.000	7.254.023.926	103

		Lain lain pad yang sah	2016	79.471.169.845	73.472.177.344	92
			2017	406.221.551.026	173.700.257.531	42
			2018	292.447.644.300	178.594.287.164	61
3	Kab Muara Enim	Pendapatan pajak daerah	2016	51.767.967.010	52.948.650.682	102
			2017	56.346.779.302	62.718.676.208	111
			2018	95.382.083.081	69.037.972.075	72
		Pendapatan retribusi daerah	2016	15.071.732.372.	15.086.106.456	100
			2017	11.694.035.086	10.501.181.769	111
			2018	10.164.678.326	24.515.827.175	241
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	7.891.363.203	7.891.363.203	100
			2017	8.390.341.277	8.390.341.277	100
			2018	17.160.828.134	17.160.828.134	100
		Lain lain pad yang sah	2016	90.505.062.104	74.986.402.621	82
			2017	204.176.539.207	145.319.034.009	78
			2018	104.881.729.384	121.754.081.199	111
4	Kab Lahat	Pendapatan pajak daerah	2016	85.075.585.774	33.722.143.791	39
			2017	174.466.367.801	37.008.535.966	21
			2018	40.808.068.419	39.707.051.390	97
		Pendapatan retribusi daerah	2016	6.280.888.000	5.295.693.247	84
			2017	6.918.883.736	5.315.837.735	80
			2018	7.259.000.000	4.859.751.111	66
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	11.119.078.443	6.119.078.443	55
			2017	11.500.000.000	6.931.888.290	60
			2018	6.500.000.000	4.859.751.111	66
		Lain lain pad yang sah	2016	80.793.225.542	139.835.879.368	173
			2017	155.017.187.498	115.238.915.559	74
			2018	69.198.700.000	61.504.918.712	88
5	Kab musi rawas	Pendapatan pajak daerah	2016	35.813.418.254	24.228.776.676	67
			2017	31.607.456.500	26.940.641.904	85
			2018	36.654.444.900	27.303.822.001	70
		Pendapatan retribusi daerah	2016	3.808.359.562	3.315.653.910	87
			2017	5.070.005.250	3.332.543.828	65
			2018	4.344.831.250	3.437.132.082	79
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	10.000.000.000	5.258.122.651	52
			2017	12.000.000.000	4.981.890.993	41
			2018	5.500.000.000	4.818.254.972	87
		Lain lain pad yang sah	2016	63.295.308.846	63.941.317.617	101
			2017	131.709.192.205	116.349.005.910	88
			2018	74.516.404.948	70.730.176.269	94
6	Kab OKU	Pendapatan pajak daerah	2016	19.964.547.531	20.338.589.960	131
			2017	32.808.004.898	38.559.592.287	117
			2018	44.538273.987	43.504.672.972	97

		Pendapatan retribusi daerah	2016	3.074.847.277	2.815.507.176	91
			2017	2.767.780.778	2.081.296.968	75
			2018	3.453.349.500	2.744.267.743	79
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	3.015.000.000	3.229.126.578	107
			2017	3.015.000.000	3.061.123.691	101
			2018	3.520.000.000	2,895.950.606	83
		Lain lain pad yang sah	2016	56.043.588.037	55.195.419.700	98
			2017	111.692.484.307	128.311.151.499	114
			2018	135.529.099.078	107.477.162.469	79
7	Kab banyuasin	Pendapatan pajak daerah	2016	53.279.093.975	56.841.656.913	106
			2017	61.394.731.000	72.514.691.201	118
			2018	72.521.285.353	82.349.366.395	113
		Pendapatan retribusi daerah	2016	12.388.949.760	10.044.357.883	81
			2017	6.635.297.000	8,069.798.706	121
			2018	6.555.099.000	7.751.152.778	118
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	3.700.000.000	3.784.442.521	102
			2017	4.116.000.000	4.116.082.327	100
			2018	4.432.071.561	4.432.071.561	100
Lain lain pad yang sah	2016	51.867.680.014	33.547.788.149	64		
	2017	38.013.204.967	41.283.795.653	108		
	2018	37.763.187.345	46.069.481.754	122		
8	Kab OKU Timur	Pendapatan pajak daerah	2016	18.951.390.000	21.195.826.198	111
			2017	21.221.390.000	28.519.990.236	134
			2018	23.578.648.500	30.073.016.388	127
		Pendapatan retribusi daerah	2016	7.914.891.200	5.001.555.002	63
			2017	10.014.190.600	5.677.378.110	56
			2018	9.786.080.000	8.196.974.321	83
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	1.250.000.000	1.475.543.862	118
			2017	1.670.000.000	1.672.932.527	100
			2018	1.800.000.000	1.856.729.603	103
Lain lain pad yang sah	2016	33.989.100.00	41.684.513.584	122		
	2017	40.750.000.000	41.836.483.421	102		
	2018	41.542.022.357	45.108.392.107	108		
9	Kab OKU Selatan	Pendapatan pajak daerah	2016	7.641.000.000	8.015.920.952	104
			2017	8.003.500.000	12.114.840.273	151
			2018	11.525.575.000	13.021.942.319	112
		Pendapatan retribusi daerah	2016	6.169.000.000	2.894.609.350	46
			2017	5.517.000.000	3.792.382.050	68
			2018	6.371.000.000	5.260.553.922	82
		Pendapatan kekayaan daerah yang	2016	3.357.026.472	3.357.026.472	100
			2017	3.429.985.483	3.429.985.483	100
			2018	3.405.078.314	3.405.078.314	100

		di pisahkan				
		Lain lain pad yang sah	2016	25.536.217.245	21.429.378.020	83
			2017	74.786.280.000	70.169.390.971	93
			2018	29.826.212.717	21.305.560.196	71
10	Kab OI	Pendapatan pajak daerah	2016	229.830.499.453	62.843.668.168	27
			2017	151.875.213.318	15.769.597.192	10
			2018	100.000.000.000	19.462.789.192	19
		Pendapatan retribusi daerah	2016	47.600.880.113	4.385.865.468	9
			2017	24.940.042.482	4.010.595.460	16
			2018	9.357.892.500	5.640.043.543	60
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	5.000.000.000	3.172.960.673	63
			2017	3.500.000.000	2.997.496.764	85
			2018	2.912.171.852	2.912.171.852	100
		Lain lain pad yang sah	2016	87.824.480.370	39.360.122.818	44
			2017	132.770.632.692	72.934.148.319	54
			2018	69.832.568.750	27.347.958.526	39
11	Kab Empat Lawang	Pendapatan pajak daerah	2016	10.752.091.630	9.772.694.199	90
			2017	10.752.091.630	10.019.913.220	93
			2018	14.902.091.630	10.417.052.140	69
		Pendapatan retribusi daerah	2016	3.893.495.000	2.844.887.249	73
			2017	1.595.030.000	716.537.050	44
			2018	770.000.000	463.950.000	60
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	6.000.000.000	4.882.979.868	81
			2017	6.000.000.000	4.573.424.808	76
			2018	6.000.000.000	4.864.464.953	81
		Lain lain pad yang sah	2016	13.175.000.000	4.847.249.962	36
			2017	57.676.350.450	53.496.839.575	92
			2018	37.483.802.772	16.472.025.395	43
12	Kab PALI	Pendapatan pajak daerah	2016	15.132.670.673	7.109.679.674	46
			2017	29.842.419.610	12.062.403.805	40
			2018	51.503.500.000	45.688.054.975	88
		Pendapatan retribusi daerah	2016	1.968.000.000	2.158.679.900	109
			2017	2.963.988.866	1.688.033.890	56
			2018	5.478.100.000	4.409.777.193	80
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	-	-	
			2017	-	-	
			2018	7.000.000.000	7.254.023.926	103
		Lain lain pad yang sah	2016	18.171.274.360	17.081.954.567	94
			2017	55.995.790.147	43.184.350.120	77
			2018	292.447.644.700	178.594.287.164	61
13	Kab musi Rawas	Pendapatan pajak	2016	10.865.823.091	13.051.897.933	120
			2017	11.457.658.091	10.032.140.048	87

	utara	daerah	2018	11.999.500.000	9.648.375.423	80		
		Pendapatan retribusi daerah	2016	573.800.000	508.787.250	88		
			2017	866.528.000	718.642.193	82		
			2018	809.028.000	575.358.998	71		
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	-	-	-		
			2017	-	-	-		
			2018	-	-	-		
		Lain lain pad yang sah	2016	17.855.576.000	18.614.175.714	104		
			2017	47.073.500.000	46.830.209.839	99		
			2018	23.207.644.000	19.918.096.288	85		
14	Kota Palembang	Pendapatan pajak daerah	2016	526.867.498.866	536.552.681.049	101		
			2017	638.549.551.000	680.012.752.910	106		
			2018	748.685.000.000	721.012.771.615	96		
		Pendapatan retribusi daerah	2016	106.582.011.666	75.946.671.693	71		
			2017	101.707.504.048	59.805.678.186	58		
			2018	129.542.752.058	48.099.866.347	37		
		Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan	2016	52.950.000.000	50.362.039.101	95		
			2017	64.452.894.174	61.860.027.525	95		
			2018	79.943.112.945	62.318.561.125	77		
		Lain lain pad yang sah	2016	154.172.795.566	118.552.555.921	76		
			2017	294.599.018.618	290.026.147.232	98		
			2018	142.334.290.696	121.870.883.539	85		
	15	Kota prabumulih	Pendapatan pajak daerah	2016	22.865.000.000	21.849.772.602	95	
				2017	30.345.028.000	24.791.075.219	81	
2018				24.182.000.000	26.170.664.964	108		
Pendapatan retribusi daerah			2016	8.201.000.000	3.464.437.585	42		
			2017	11.201.000.000	2.952.415.608	26		
			2018	3.098.600.000	2.576.692.247	83		
Pendapatan kekayaan daerah yang di pisahkan			2016	1.600.000.000	1.642.392.320	102		
			2017	2.500.000.000	1.538.273.346	61		
			2018	1.500.000.000	1.454.356.981	96		
Lain lain pad yang sah			2016	64.342.666.626	59.296.590.759	92		
			2017	85.166.001.250	89.910.896.553	105		
			2018	57.508.000.000	60.708.806.874	105		
16			Kota pagaralam	Pendapatan pajak daerah	2016	5.277.693.675	5.761.651.415	109
					2017	5.224.020.579	7.093.380.548	135
	2018	5.743.020.579			8.254.708.162	143		
	Pendapatan retribusi daerah	2016		2.860.720.000	2.282.828.998	79		
		2017		2.711.276.500	2.748.701.775	101		
		2018		2.486.520.000	2.538.878.911	102		
	Pendapatan kekayaan	2016		4.510.264.997	5.029.859.760	79		
		2017		4.510.264.997	4.996.853.124	110		

		daerah yang di pisahkan	2018	4.510.264.997	4.832.400.884	107
		Lain lain pad yang sah	2016	38.355.478.000	38.038.677.245	99
	2017		53.839.115.706	50.699.956.997	94	
	2018		54.426.191.900	57.974.356.396	106	
17	Kota lubuk linggau	Pendapatan pajak daerah	2016	44.381.773.400	22.254.693.729	50
	2017		48.539.122.600	29.121.881.915	60	
	2018		54.169.448.352	38.458.611.583	71	

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 2021

Bedasarkan pada tabel I.1 di atas di atas menunjukkan bahwa dilihat dari realisasi dan anggaran pendapatan Asli Daerah pencapaian unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil pada 3 tahun ini tidak tercapai 100%.

Tabel I.2
Anggaran dan realisasi belanja daerah
2016-2018

No	Keterangan	Tahun	Anggaran	realisasi	Lebih/Kurang	%
1	Kab Musi Banyuasin	2016	3.369.864.428.760	3.369.864.428.760	453.898.302.913	86
		2017	2.340.644.994.246	2.566.618.015.238	225.973.020.992	91
		2018	2.569.463.000.596	3.082.227.677.300	512.764.676.704	83
2	Kab Ogan Komering Ilir	2016	1.979.334.457.211	2.405.340.475.694	426.006.018.483	82
		2017	2.108.841.619.655	2.404.671.043.167	295.829.423.512	87
		2018	1.918.481.263.913	2.276.782.697.496	358.301.433.583	84
3	Kab Muara Enim	2016	1.856.355.068.461	2.180.613.601.003	324.258.532.542	85
		2017	1.897.083.715.448	2.033.737.393.568	136.653.678.120	93
		2018	2.024.892.686.233	2.228.711.817.275	203.819.131.042	90
4	Kab Lahat	2016	1.545.145.014.219	1.747.349.170.737	202.204.156.518	88
		2017	1.408.832.916.558	1.715.307.187.872	306.474.271.314	82
		2018	1.415.652.399.338	1.508.278.068.894	92.625.669.556	93
5	Kab Musi Rawas	2016	1.531.168.541.789	1.713.677.287.682	182.508.745.893	89
		2017	1.192.026.376.976	1.313.648.923.369	121.622.546.393	90
		2018	1.376.221.712.061	1.478.278.552.883	102.056.840.822	93
6	Kab Ogan Komering Ulu	2016	993.279.511.858	1.125.614.280.184	132.334.768.326	88
		2017	1.186.374.978.507	1.496.966.683.589	310.591.705.082	79
		2018	1.419.173.692.318	1.555.020.589.427	135.846.897.109	91
7	Kab Banyuasin	2016	1.602.242.344.994	1.909.404.888.586	307.162.543.592	83
		2017	1.628.359.459.142	1.753.925.985.430	125.566.526.288	92
		2018	1.629.716.210.554	1.747.255.308.668	117.539.098.115	93
8	Kab Ogan	2016	1.285.585.518.994	1.428.590.115.527	143.004.596.533	90

	Kmering ulu Timur	2017	1.289.877.393.143	1.356.701.260.104	66.823.866.961	95
		2018	1.301.762.404.136	1.369.273.661.623	67.511.257.487	95
9	Kab OKU Selatan	2016	1.014.409.319.470	1.297.794.672.064	283.385.352.593	78
		2017	989.011.519.449	1.307.009.246.751	317.997.727.302	75
		2018	995.314.731.497	1.056.191.744.695	60.877.013.198	94
10	Kab Ogan Ilir	2016	1.102.973.684.231	1.453.289.005.113	350.315.320.882	75
		2017	1.115.443.315.900	1.408.398.367.088	292.955.051.188	79
		2018	1.100.847.356.274	1.285.379.215.190	184.531.858.916	85
11	Kab Empat Lawang	2016	648.861.582.371	750.557.059.039	101.695.476.667	86
		2017	722.850.409.112	792.729.567.455	69.879.158.343	91
		2018	816.315.016.923	816.260.348.444	54.668.479	100
12	Kab PALI	2016	743.680.887.421	821.589.125.476	77.908.238.056	90
		2017	865.926.979.942	928.100.489.709	62.173.509.766	93
		2018	1.209.362.647.058	1.601.838.312.185	392.475.665.127	75
13	Kab Musi Rawas Utara	2016	720.301.758.791	813.614.247.749	93.312.488.958	88
		2017	677.194.130.354	785.394.510.490	108.200.380.136	86
		2018	745.679.015.506	922.981.792.439	177.302.776.933	80
14	Kota Palembang	2016	2.915.966.125.847	3.369.864.428.760	453.898.302.913	86
		2017	3.141.848.658.598	3.383.208.534.685	241.359.876.087	92
		2018	3.488.244.426.631	3.992.371.467.223	504.127.040.591	87
15	Kota Prabumulih	2016	891.296.683.203	1.018.217.047.127	126.920.363.924	87
		2017	847.874.024.732	924.840.329.509	76.966.304.777	91
		2018	828.981.738.194	879.409.524.643	50.427.786.449	94
16	Kota Pagar Alam	2016	828.981.738.194	945.858.698.078	116.876.959.884	87
		2017	743.610.049.832	893.475.825.816	149.865.775.984	83
		2018	655.603.214.054	814.110.436.060	158.507.222.006	80
17	Kota Lubuk Linggau	2016	809.943.066.643	896.856.354.360	86.913.287.717	90
		2017	870.709.076.210	967.151.199.502	96.442.123.293	90
		2018	859.504.888.223	949.569.693.009	90.064.804.786	90

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pada tabel I.2 Realisasi belanja daerah masih tergolong belum tercapai 100 % .

Dari permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat Efektifitas Pendapatan Asli daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tingkat Efektifitas Pendapatan Asli daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti akurat tentang efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Daerah.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola keuangan yang telah dianggarkan oleh pemerintah agar menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tepat dan akurat.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan data

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Ade Oktavia. 2019. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang. (<http://repository.um-palembang.ac.id> diakses 16 Desember 2020).
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. 2020. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018*. Provinsi Sumatera Selatan. (<http://bpkad.sumselprov.go.id> diakses 21 November 2020).
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Sumatera Selatan Dalam Angka 2020*. BPS Provinsi Sumatera Selatan: Palembang. (<http://sumsel.bps.go.id> diakses 18 Januari 2021)
- Beni Peki. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Taushia.
- Dwi Putri Kusuma H. 2014. Efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2012 di Kabupaten Kulon Progo. *Tugas Akhir*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. (<http://core.ac.uk> diakses 15 Desember 2020)
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Keuangan*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Keuangan*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (www.djpk.kemenkeu.go.id di akses 25 november 2020).

Permendagri No. 12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah. (<http://sipuu.setkab.go.id> diakses 25 November 2020).

Profil Kabupaten Banyuasin. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Banyuasin: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

_____ Empat Lawang. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Empat Lawang: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

_____ Lahat. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Lahat: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

_____ Musi Banyuasin. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Musi Banyuasin: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

_____ Muara Enim. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Muara Enim: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

_____ Musi Rawas. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Musi Rawas: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

_____ Musi Rawas Utara. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Musi Rawas Utara: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

_____ Ogan Ilir. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Ogan Ilir: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

_____ Ogan Komering Ilir. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Ogan Komering Ilir: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

_____ Ogan Komering Ulu. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Ogan Komering Ulu: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).

- _____ Ogan Komering Ulu Selatan. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).
- _____ Ogan Komering Ulu Timur. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).
- _____ Penukal Abab Lematang. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kabupaten Penukal Abab Lematang: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).
- Profil Kota Lubuk Linggau. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kota Lubuk Linggau: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).
- _____ Pagar Alam. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kota Pagar Alam: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).
- _____ Palembang. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kota Palembang: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).
- _____ Prabumulih. 2019. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah. Kota Prabumulih: Provinsi Sumatera Selatan. (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses 19 Januari 2021).
- Purnomo, Budi. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metodelogi Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan Ke 25. Bandung: Alfabeta.
- Siti Yuliana. 2017. Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2014. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (<http://repository.uinjkt.ac.id> diakses 15 Desember 2020)
- Tria Istina. 2017. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora Tahun 2012-2016. *Skripsi*. Universitas Bojonegoro.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (<http://pih.kemlu.go.id> diakses 17 Desember 2020).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 33 th 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Vincentia Putri Kusumastuti. 2010. Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. (<http://repository.usd.ac.id> diakses 15 Desember 2020)

V. Wiratna S. 2018. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaru pres.

Yulius Fitri. 2008. Analisis Efisiensi Belanja Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. (<http://repository.usd.ac.id> diakses 15 Desember 2020).